JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI BISNIS, KEWIRAUSAHAAN
Halaman Jurnal: https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/ekonomika
Halaman UTAMA Jurnal : https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Pembiayaan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga

Teguh Priyono [1], Abdul Aziz Ahmad*[2], Lilis Siti Badriah[3]
[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
teguh.priyono@mhs.unsoed.ac.id[1], abdul.ahmad@unsoed.ac.id[2], lilis.badriah@unsoed.ac.id[3]

Alamat: Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122
*Koresprodensi penulis : abdul.ahmad@unsoed.ac.id**

Abstrak. *Fiscal decentralization is an implementation of regional autonomy, where fiscal decentralization provides space for regional governments to develop the regional economy, including alleviating poverty by utilizing regional financial tools. The aim of this research is to analyze the influence of local revenue, balancing funds and financing funds on poverty. This research uses secondary data with time series data for the period 2007-2022. This research uses multiple regression analysis techniques (Ordinary Least Square). Based on the results of the analysis, it shows that local original income and balancing funds have a negative and significant effect on poverty. Meanwhile, financing funds have no effect on poverty in Purbalingga Regency.*

Keywords*: Fiscal Decentralization; Locally-generated revenue; Balancing Fund; Financing Funds; Poverty*

Abstrak. Desentralisasi fiskal merupakan suatu implementasi dari dilaksanakannya otonomi daerah, di mana desentralisasi fiskal memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian daerah termasuk mengentaskan kemiskinan dengan memperalat keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana pembiayaan terhadap kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series periode tahun 2007-2022. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda (Ordinary Least Square). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan dana pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Dana Pembiayaan; Kemiskinan.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi, dari tahun ke tahun menjadi isu global, nasional, bahkan lokal sehingga perlu perhatian banyak pihak dan menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidak berdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberdayaan dalam memenuhi hak-hak dasar, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan lainnya. (Pemprov Jawa Tengah, 2019)

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Permasalahan kemiskinan menjadi persoalan bangsa yang terus menerus dilakukan percepatan dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan kondisi kemiskinan di Indonesia:

Received: Oktober 29, 2024; Revised: November 30, 2024; Accepted: Desember 22, 2024;
Published: Desember 24, 2024

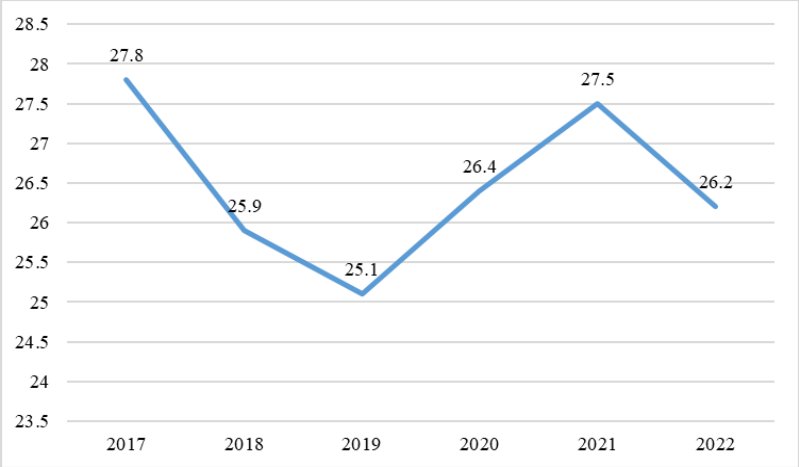

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 2017-2022

Berdasarkan Gambar 1.1 kondisi kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2019, lalu meningkat di tahun 2019 hingga 2021, serta menurun di tahun 2022. Secara rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia berada di angka 26 juta jiwa. Tentu jumlah ini bukan angka yang sedikit sehingga kemiskinan merupakan masalah yang serius demi mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan. Kemiskinan di Indonesia tersebar di setiap pulau dan memiliki kondisi yang berbeda-beda satu sama lain. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan kondisi kemiskinan di Indonesia berdasarkan pulau:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Pulau di Indonesia, 2019-2022

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Pulau (Ribu Jiwa)			
	2019	2020	2021	2022
Jawa	12.555,90	14.752,02	14.023,52	13.106,92
Sumatera	4.767,52	5.851,53	5.862,66	5.763.42
Sulawesi	1.988,76	2.061,51	2.007,08	2.030.71
Papua	1.108,50	1.127,45	2.093,04	1.537.42
Kalimantan	961,52	1.016,10	975,41	995,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 1. menggambarkan tentang kemiskinan dengan ukuran jumlah penduduk miskin. Kemiskinan tertinggi setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2022 yaitu di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding dengan pulau-pulau lain. Padahal Pulau Jawa merupakan sentra pembangunan yang relatif lebih maju dibanding dengan pulau lain. Berikut merupakan kondisi kemiskinan per provinsi di Pulau Jawa:

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2019-2022

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)								Rata-Rata
	2019		2020		2021		2022		
	Sms 1	Sms 2	Sms 1	Sms 2	Sms 1	Sms 2	Sms 1	Sms 2	
DKI Jakarta	3,47	3,42	4,53	4,69	4,72	4,67	4,69	4,61	4,35
Jawa Barat	6,91	6,82	7,88	8,43	8,4	7,97	8,06	7,98	7,81
Jawa Tengah	10,8	10,58	11,41	11,84	11,79	11,25	10,93	10,98	11,19
DI. Yogyakarta	11,7	11,44	12,28	12,8	12,8	11,91	11,34	11,49	11,97
Jawa Timur	10,37	10,2	11,09	11,46	11,4	10,59	10,38	10,49	10,74
Banten	5,09	4,94	5,92	6,63	6,66	6,5	6,16	6,24	6,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di setiap provinsi mengalami fluktuasi. Secara rata-rata kondisi kemiskinan tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta, lalu kondisi kedua tertinggi adalah Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan di Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibanding provinsi lain kecuali DI Yogyakarta.

Kondisi kemiskinan ini dapat diatasi dengan berbagai cara salah satunya adalah desentralisasi fiskal yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menekan kemiskinan di daerah masing-masing. Penelitian Siburian (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal Indonesia memberikan kontribusi terhadap hasil pengentasan kemiskinan. Selain itu Ramírez et al., (2017) desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kolombia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan dengan asas desentralisasi secara keseluruhan dapat menekan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat ke-4 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meskipun terdapat penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebesar 0,94 persen dibandingkan persentase tahun 2021, namun Purbalingga masih menjadi nomor 1 terkait jumlah penduduk miskin di Eks Karesidenan Banyumas, sebagaimana data Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 3. Peringkat Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2022

Peringkat	Kabupaten	Persentase
1	Purbalingga	15,30
2	Banjarnegara	15,20
3	Banyumas	12,84
4	Cilacap	11,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban setiap daerah masing-masing. Hal ini dilakukan atas dasar asas otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia memiliki tujuan untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi. Otonomi daerah melaksanakan kebijakan dengan melimpahkan wewenang dari pusat kepada daerah. Dengan hal ini maka diharapkan pembangunan setiap daerah diatur sesuai dengan permasalahan dan potensi masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berlanjut kepada pelimpahan wewenang dalam mengatur keuangan. Pengaturan keuangan yang dilakukan daerah atas dasar wewenang yang diberikan oleh pusat disebut dengan desentralisasi fiskal. Penelitian Permai et al., (2021) menunjukkan bahwa pengaruh dari otonomi keuangan akan memberikan kinerja yang positif bagi perekonomian. Selain itu diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Roy et al., (2019) dengan menggunakan heuristic network menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang.

Desentralisasi fiskal dilakukan atas dasar perbedaan potensi di setiap daerah. Potensi ini yang mengetahui dan menguasai adalah pemerintah daerah masing-masing. Selain itu desentralisasi fiskal bertujuan untuk menekan ketimpangan antar daerah (Sambanis & Milanovic, 2014). Ketika desentralisasi fiskal diberikan maka daerah-daerah dapat memaksimalkan keuangan untuk membangun daerah masing-masing. Pelaksanaan keuangan daerah bukan berarti terlepas dari pengawasan pemerintah pusat. Dalam pelaksanan desentralisasi dilakukan pengawasan oleh pemerintah pusat dengan tujuan agar berjalan dengan lancar. Pengawasan dan evaluasi pusat diperlukan untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Granado et al., 2018).

Desentralisasi fiskal diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Romdioni et al., (2020) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan arti ketika desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan baik sesusai dengan prosedur dan tidak ada korupsi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hanif et al., (2014) yang dilakukan di Paskistan menunjukkan bahwa indikator desentralisasi fiskal dari pendapatan dan belanja pemerintah dapat meingkatkan perkembangan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudhipongpracha & Wongpredee, (2017) pada penelitian di Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa fiskal antar pemerintah tidak dapat diprediksi dan sangat dipolitisasi. Dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat harus memberikan kontrol pada pelaksanaannya. Namun pada dasarnya pelaksanaan desentralisasi ini

memberikan kemanfaatan seperti hasil penelitian yang diperoleh dari Khusaini, (2014). Analisis deskriptif-komparatif yang dilakukan menunjukkan bahwa sejak diterapkannya desentralisasi fiskal menyebabkan peran pemerintah daerah semakin besar dalam menentukan perencanaan dan penganggaran.

Desentralisasi fiskal memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya (Ghozali & Khoirunurrofik, 2020). Hal ini dilakukan dikarenakan bahwa kemiskinan di setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda sehingga yang memahami permasalahan tersebut adalah pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal dilaksanakan secara keseluruhan oleh pemerintah daerah maka rawan akan kecurangan. Desentralisasi fiskal merupakan suatu usaha pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi yang daerah miliki. Salah satu tujuan dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pengentasan kemiskinan. Berikut merupakan anggaran PAD, Dana Perimbangan, dan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Purbalingga :

Tabel 4. Anggaran PAD, Dana Perimbangan, dan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Purbalingga, 2018-2022 (Juta Rupiah)

Anggaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	282.679	305.886	202.004	377.622	102.187
Dana Perimbangan	1.240.574	1.271.720	1.144.405	969.599	1.699.748
Pembiayaan Daerah	114.486	125.154	130.005	179.575	119.082

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa kondisi dana PAD, dana perimbangan, dan pembiayaan daerah berfluktuatif. Kondisi penurunan PAD di tahun 2020 dikarenakan oleh adanya pandemic Covid-19. Secara umum kondisi dana perimbangan dan dana pembiayaan memiliki trend meningkat. Potensi desentralisasi fiskal Kabupaten Purbalingga seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun pada kenyataannya Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2022 masih menjadi kabupaten termiskin nomor satu di Eks Karesidenan Banyumas.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan Hamzah, (2009), Manek & Badrudin, (2017), dan Amami & Asmara, (2022) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Syahidin & Jalil (2020), Gumelar, (2021), Nany et al., (2022), dan Mardiansyah et al., (2023) menunjukkan bahwa secara parsial dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh negatif

dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika dana perimbangan ditingkatkan maka kemiskinan akan menurun. Kondisi keuangan yang tidak menentu memberikan dampak kepada kemiskinan di Purbalingga. Desentralisasi fiskal merupakan proses praktik dalam mengolah keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Berdasarkan penelitian Nursini & Tawakkal, (2019) pendapatan pemerintah daerah dan dana transfer pemerintah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik keuangan daerah dapat mengentaskan kemiskinan.

Tabel 3 menunjukkan bahwa Purbalingga merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah exs keresidenan banyumas. Padahal desentralisasi fiskal yang dilaksanakan di Purbalingga berjalan l dengan sebagai mestinya. Pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut dicerminkan dengan anggaran pada Tabel 4 yang menunjukkan trend yang relatif meningkat. Sehingga seharusnya dengan adanya desentralisasi fiskal ini Kabupaten Purbalingga dapat menekan tingkat kemiskinan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan, dan dana pembiayaan terhadap kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kemiskinan

Teori kemiskinan sebagai dasar teori yaitu teori lingkaran kemiskinan atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai vacious circle of poverty yang merupakan teori dari Ragnar Nurske. Teori ini dikemukakan Nurske dalam bukunya Problems of Capital Formation in Underdeveloped Country pada tahun 1953. Lingkaran kemiskinan merupakan teori yang mengatakan sebuah rangkaian kekuatan dengan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga suatu negara tetap miskin (Arsyad, 2010). Berikut merupakan gambar yang menunjukkan lingkaran kemiskinan:

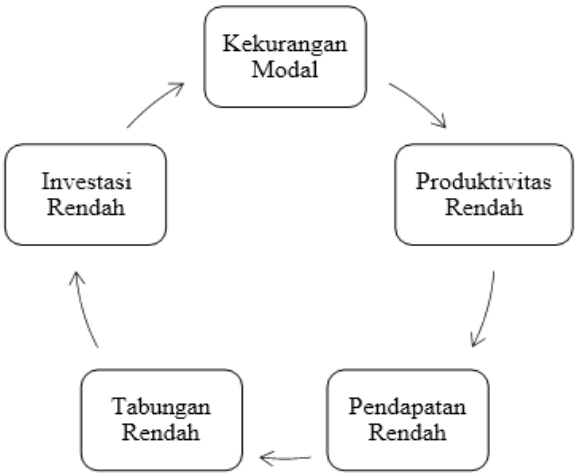

Sumber : Arsyad (2010)

Gambar 2. Lingkaran Kemiskinan

Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, daerah diwajibkan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Salah satu hal yang dilaksanakan mandiri adalah keuangan daerah atau biasa disebut dengan desentralisasi fiskal. Li et al., (2023) pemerintah pusat harus melakukan transfer ke daerah guna meningkatkan layanan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah daerah lah yang memahami situasi yang sebenarnya dari masyarakat daerah tersebut.

Desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk pemerataan dan pengentasan kemiskinan di daerah, di mana setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penyelenggaraan pengeluaran dan pendapatan daerah diatur oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Desentralisasi fiskal memberikan peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah semakin besar dalam menentukan perencanaan dan penganggaran (Khusaini, 2014)

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan data time series pada periode 2007-2022. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis regresi berganda (Ordinary Least Square). Penelitian akan menganalisis pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana pembiayaan terhadap kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Kemiskinan akan diukur dengan satuan persen. PAD, dana perimbangan, dan dana pembiayaan akan diukur dengan ribu rupiah.

Regresi Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda. Teknik ini digunakan untuk menganalisis pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent. Penelitian ini menggunakan kemiskinans sebagai variabel dependent, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan dana pembiayaan sebagai variabel independent. Berikut merupakan model regresi pada penelitian ini:

$$\boldsymbol{Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e}$$

Keterangan:

Y : Kemiskinan

β_0 : Koefisien regresi

β_1 : Koefisien regresi (PAD)

β_2 : Koefisien regresi (Dana Perimbangan)

β_3 : Koefisien regresi (Dana Pembiayaan)

X_1 : PAD

X_2 : Dana Perimbangan

X_3 : Dana Pembiayaan

e : Error

Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

   Uji normalitas dilakukan untuk menganalisis data terdistribusi normal atau tidak. Pada tahap ini akan dianalisis dengan menggunakan uji kolmogrov-smirnov uji ini menggunakan kriteria nilai signifikansi yang harus lebih besar >0,05. Jika nilai

menunjukkan hal tersebut maka data dapat dinyatakan sebagai data yang terdistribusi normal.

2. Uji Multikolienaritas

   Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui tidak terjadinya multikolinearitas dalam variabel bebas yang berada dalam suatu model, artinya antara variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna, bila terjadi maka antara variabel bebas terjadi korelasi, sehingga sulit diketahui variabel mana yang mempengaruhi. Kriteria uji multikolienaritas menggunakan nilai VIF<10 maka dapat dikatakan model tidak terdapat gejala multikolienaritas (Ghozali, 2018).

3. Uji Heteroskedastisitas

   Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan model karena varian gangguan antara satu observasi. Penelitian ini akan menggunakan sclatterplot sebagai bahan analisis heteroskedastitas. Jika titik-titik tersebar dan tidak membentuk suatu pola maka dapat dikatakan model terbebas dari gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

4. Uji Autokorelasi

   Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi akan menggunakan uji Durbin Watson (Ghozali, 2018).

Uji Statistik

Uji statistik merupakan serangkaian uji dalam regresi berganda untuk menganalisis pengaruh secara parsial dan pengaruh secara simulutan. Pengujian pengaruh parsial dilakukan dengan uji t sedangkan pengujian simultan dilakukan dengan uji F. Akan dilakukan analisis dengan menilai signifikansi, ketika nilai signifikansi <0,05 maka dapat dikatakan berpengaruh signifikan.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan serangkaian uji untuk menganalisis kontribusi dari variabel independent terhadap variabel dependent. Koefisien determinasi ini akan menggunakan Adjusted R-Square yang memiliki nilai 0-1.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regresi Berganda

Dengan menggunakan bantuan SPSS, berikut merupakan hasil analisis regresi berganda:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15,288	1,432		10,677	0,000
LNX1	-0,111	0,044	-0,492	-2,524	0,033
LNX2	-0,363	0,068	-0,899	-5,369	0,000
LNX3	0,108	0,050	0,467	2,167	0,058

Sumber: SPSS, diolah

$$\boldsymbol{KEMISKINAN = 15,288 - 0,111PAD - 0,363TKD + 0,108PEMBIAYAAN + e}$$

Berikut merupakan interpretasi dari model regresi:

1. Koefisien 15,288 menunjukkan bahwa ketika nilai PAD, dana perimbangan atau transfer ke daerah (TKD), dan dana pembiayaan nol maka kemiskinan adalah 15,28 persen.
2. PAD menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan. Jika PAD dinaikan satu persen maka kemiskinan akan turun 0,111 persen.
3. TKD menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Jika TKD dinaikan satu persen maka kemiskinan akan turun 0,363 persen.
4. Dana pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berikut merupakan analisis uji normalitas dengan Kolmogrof Smirnov:

Tabel 6. Uji Normalitas

Kriteria	Nilai
Test Statistik	0,213
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,109

Sumber : SPSS, diolah

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Asymp, Sig adalah 0,109 di mana nilai ini >0,05. Maka dapat dikatakan model memiliki data yang terdistribusi secara normal.

1. Uji Multikolienaritas

   Berikut merupakan analisis uji multikolienaritas:

Tabel 7. Uji Multikolienaritas

Tolerance	VIF
0,417	2,396
0,567	1,765
0,343	2,919

Sumber : SPSS, diolah

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat dkatakan model terbebas dari gejala multikolienaritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

   Berikut merupakan analisis uji heteroskedastisiitas:

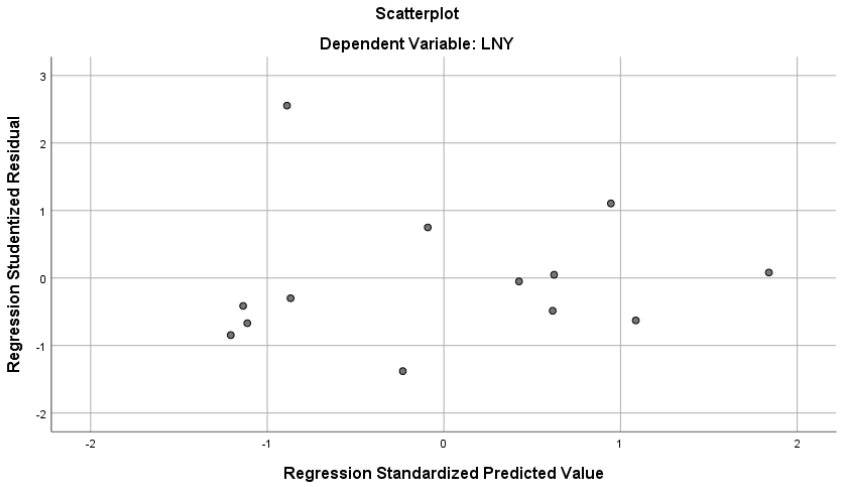

Sumber: SPSS, diolah

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 3. hasil analisis menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola. Maka dari itu dapat dikatakan model terbebas dari gejala heteroskedastisitas

3. Uji Autokorelasi

Berikut merupakan uji autokorelasi:

Tabel 8. Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,926	0,857	0,809	0,05518	1,770

Sumber: SPSS, diolah

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai dw adalah 1,770. Berdasarkan table Durbin Watson diketahui bahwa nilai DL adalah 0,7147 dan DU adalah 1,8159. Berdasarkan hal tersebut maka autokorelasi dapat disimpulkan pada kondisi dl < d < du atau tidak ada autokorelasi positif dan tidak ada keputusan.

Uji F

Berikut merupakan table uji F:

Tabel 9. Uji F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressin	0,164	3	0,055	17,983	0,000
	Residual	0,027	9	0,003		
	Total	0,192	12			

Sumber: SPSS, diolah

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000. Di mana nilai ini <0,05 maka data dikatakan secara keseluruhan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Purbalingga.

Uji t

Berikut merupakan table uji t

Tabel 10. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	15,288	1,432		10,677	0,000
	LNX1	-0,111	0,044	-0,492	-2,524	0,033

LNX2	-0,363	0,068	-0,899	-5,369	0,000
LNX3	0,108	0,050	0,467	2,167	0,058

Sumber: SPSS, diolah

Berdasarkan Tabel 10 berikut merupakan penjelasan uji t:

1. Variabel PAD memiliki nilai signifikansi 0,033 dan koefisien bernilai negatif. Di mana nilai ini <0,05 maka dapat dikatakan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Purbalingga.
2. Variabel TKD memiliki nilai signifikansi 0,000 dan koefisien bernilai negatif. Di mana nilai ini <0,05 maka dapat dikatakan bahwa TKD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Purbalingga.
3. Variabel dana pembiayaan memiliki signifikansi 0,058. Di mana nilai ini menunjukkan <0,05 dapat dikatakan bahwa dana pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis berikut merupakan table koefisien determinasi :

Tabel 11. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,926	0,857	0,809	0,05518	1,770

Sumber: SPSS, diolah

Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai Adjusted-Rsquare yaitu 0,809 atau 80,9 persen. Dapat dikatakan bahwa secara bersama sama PAD, TKD, dan dana pembiayaan berkontribusi dalam mempengaruhi kemiskinan di Purbalingga. Sedangkan sisanya adalah 19,1 persen dijelaskan oleh variabel di luar penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merepresentasikan sebagai pendapatan yang didapatkan oleh daerah dalam satu periode. PAD merupakan pendapatan yang sebenar-benarnya didapatkan oleh daerah atas dasar kinerja pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di

Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa PAD yang didapatkan oleh pemerinitah daerah Kabupaten Purbalingga jika ditambah maka akan menekan kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa PAD memberikan kontribusi yang baik bagi penurunan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

Hasil analisis memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paat et al., (2019) yang menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hamzah, (2009) menunjukkan hal yang sama yaitu PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan

Dana perimbangan atau Transfer Ke Daerah yang biasa disingkat dengan TKD yaitu suatu transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan asas desentralisasi fiskal. Di mana pemerintah daerah diberikan dana dan dibebaskan dalam melakukan pengolahan dana untuk pembangunan di daerah masing-masing. Berdasarkan studi kasus ini kondisi TKD di Purbalingga menunjukkan hal yang baik yaitu dapat menurunkan kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana perimbangan yang didalamnya terdapat DAU, DAK, dan DBH memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Purbalingga. Dapat dikatakan bahwa ketika dana perimbangan ditambah maka kemiskinan akan menurun. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal atas pengelolaan dana perimbangan memberikan sumbangsih yang baik bagi perekonomian Purbalingga yaitu dapat menekan kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa dana perimbangan Kabupaten Purbalingga memberikan pengaruh yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahidin & Jalil (2020), Gumelar, (2021) dan Nany et al., (2022) memberikan hasil analisis bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Dana Pembiayaan Terhadap Kemiskinan

Dana pembiayaan merupakan dana yang didapatkan untuk mengatasi kondisi defisit anggaran. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dana pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa signifikansi tidak signifikan yang memberikan arti pembiayaan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Purbalingga. Hal ini dapat

dikarenakan oleh dana pembiayaan ini sifatnya hanya melengkapi dan tidak secara langsung menyentuh masyarakat miskin sehingga pembiayaan tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

5. KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. TKD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan, dana pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah purbalingga dapat meningkatkan PAD dan mengelola TKD dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat kepada penurunan tingkat kemiskinan di Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Jurnal Ekobistek, 11, 48–54. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297

Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. UPP AMP YKPN.

Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, Journal Of Management and Creative Business Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Khoirunurrofik. (2020). Fiscal decentralisation and capital expenditure composition of regional government in Indonesia. International Journal of Trade and Global Markets, 13(1), 81–88. https://doi.org/10.1504/IJTGM.2020.104909

Granado, F. J. A., Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2018). Decentralized governance, expenditure composition, and preferences for public goods. Public Finance Review, 46(3), 359–388.

Gumelar, A. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus : Kabupaten / Kota Di Sulawesi Tengah Jurnal Ekonomi-QU. 11(2), 342–364.

Hamzah, A. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis

Jalur: Studi Pada 38 Kota/ Kabupaten di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006. Jurnal Balitbang Depdagri, 9(3), 156–176.

Hanif, I., Sharif Chaudhry, I., & Wallace, S. (2014). Fiscal Autonomy and Economic Growth Nexus: Empirical Evidence from Pakistan. Pakistan J. Soc. Sci. (PJSS), 34, 767–780.

Khusaini, M. (2014). Local government planning and budgeting process: A case of districts and cities in Indonesia. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 7(2), 141–156. https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2014.063190

Kristiawati, et al. 2019. Citra Merek Persepsi Harga dan Nilai Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Indomaret Lontar Surabaya. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17) Vol. 6 No. 2, September 2019, Hal. 27- 36.

Li, Y., Xu, M., Dai, J., Yang, Z., & Cheng, Z. (2023). Examining the Impact of Infrastructure Financialization on Uneven Regional Development: Evidence from China. Land, 12(3). https://doi.org/10.3390/land12030641

Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Telaah Bisnis, 17(2), 81–98. https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49

Mardiansyah, N., Abdul, A. A., & Suharno. (2023). The Influence Of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, And Village Funds On Poverty In The Special Region Of Yogyakarta Province. MYIC, 182–196.

Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & ... (2022). Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi …, 22(3), 247–261. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/8274%0Ahttps://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/download/8274/4938

Nursini, N., & Tawakkal. (2019). Poverty alleviation in the contexof fiscal decentralization in Indonesia. Economics and Sociology, 12(1), 270–285. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/16

Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rumate, V. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 19(1), 1–10. https://doi.org/10.35794/jpekd.15774.19.1.2017

Pemprov Jawa Tengah (2019). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Permai, S. D., Christina, A., & Santoso Gunawan, A. A. (2021). Fiscal decentralization analysis that affect economic performance using geographically weighted regression (GWR). Procedia Computer Science, 179(2020), 399–406. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.022

Ramirez, J. M., Díaz, Y., & Bedoya, J. G. (2017). Property Tax Revenues and Multidimensional Poverty Reduction in Colombia: A Spatial Approach. World

Development, 94, 406–421. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.005

Romdioni, A. N., Ulita, A. S., Hiktaop, K., Herdjiono, M. V. I., Hayon, P. P., & Kadir, A. R. (2020). Fiscal decentralization and regional income: Evidence from Papua province, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 473(1), 0–5. https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012079

Roy, J., Lestari, D., & Busari, A. (2019). Measuring the impact of fiscal decentralization on economic growth and income inequality using the heuristic network. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 8(5), 1016–1024. https://doi.org/10.35940/ijeat.E1144.0585C19

Sambanis, N., & Milanovic, B. (2014). Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries. Comparative Political Studies, 47(13), 1830–1855. https://doi.org/10.1177/0010414013520524

Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty–Evidence from Indonesia. Journal of Asian Economics, 81(101493).

Sudhipongpracha, T., & Wongpredee, A. (2017). Fiscal Decentralization in Comparative Perspective: Analysis of the Intergovernmental Grant Systems in Indonesia and Thailand. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 19(3), 245–261. https://doi.org/10.1080/13876988.2016.1138659

Syahidin, & Jalil, A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Tengah. Gajah Putih Journal of Economics Review, 2(1), 1–15.